

ABSTRAK

Korupsi mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan negara menderita kerugian, salah satu cara untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penyelesaian pembayaran UP oleh Kejaksaan RI dan urgensi yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Analisis data dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi penyelesaian pembayaran tunggakan UP oleh Kejaksaan Republik Indonesia yang diputus berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 dilaksanakan melalui gugatan perdata dan tidak bisa dieksekusi, dilaksanakan dengan mencicil dan masih berjalan, hingga tunggakan yang tidak bisa diselesaikan serta melalui upaya penghapusan UP. Urgensi bagi Kejaksaan Republik Indonesia adalah banyaknya jumlah penyelesaian tunggakan uang pengganti yang belum terealisasi secara menyeluruh. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada posisi administrasi perkara yang menggantung.

Kata Kunci: Uang Pengganti, Korupsi, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971

ABSTRACT

Corruption caused the perpetrators to obtain financial advantages and losses for the country, one of the ways to restore country's lost disadvantages is by providing additional penalty in the form of replacement money. The purpose of this research is to determine the implementation of payment settlement of Replacement Money by the Attorney General of the Republic of Indonesia and the urgency faced in the implementation of the replacement money execution in the corruption crime case based on Law Number 3 of 1971. This research type is normative legal research with legal and conceptual approach. The data analysis in this thesis research is qualitative descriptive. The research results showed that the implementation of payment completion of the arrears in replacement money by the Attorney General of the Republic of Indonesia decided based on Law Number 3 of 1971 is conducted through civil lawsuit and cannot be executed is conducted in installments and still running, until the unresolved arrears and through the deletion attempt of replacement money. The urgency for the Attorney General of the Republic of Indonesia is the large number of settlements of replacement money arrears which overall has not been realized. It is feared that this will have an impact on the administration position of the pending cases.

Keywords: Replacement Money, Corruption, Law Number 3 of 1971